

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi perusahaan serta para pemangku kepentingannya, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009:1; dalam Kadariyanty, 2011). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus disetorkan. Perusahaan meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya meminimalisasi dengan cara ini tidak dianjurkan dalam prinsip manajemen dan etika bisnis. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan benar dalam meminimalisasi beban pajak salah satunya yaitu dengan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2003; dalam Pratama, 2009:1). Dalam manajemen pajak, upaya awal yang dapat dilakukan untuk mengolah perpajakan yang efektif adalah melalui *tax planning* (perencanaan pajak).

Tax planning adalah suatu langkah yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan penghematan pajak, sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan (Aviantara dan Assosiates, 2011). Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari sebelum perusahaan melakukan *tax planning*. *Tax planning* pada penelitian ini menggunakan proksi *Corporate Effective Tax Rate* atau tarif pajak efektif perusahaan, dimana dengan menggunakan tarif pajak efektif, kita dapat mengetahui seberapa besar presentase perusahaan sebenarnya membayar pajak terhadap laba komersial yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga diharapkan dengan strategi *tax planning* yang tepat dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, dengan meminimalkan beban pajak maka sejumlah uang yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan ke pos-pos lain dalam perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lainnya.

Konsep teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang menyatakan adanya hubungan kerja antara dua atau lebih orang dalam bentuk kontrak kerjasama, dimana satu pihak yang memberi wewenang disebut

sebagai prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan pihak lain yang menerima wewenang disebut sebagai agen (manajer). Konflik keagenan dapat terjadi karena asimetri informasi antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Asimetri informasi antara agen dengan prinsipal dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik. Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* (CG) yang lemah menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Corporate governance adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah asimetri informasi yang dapat mendorong terjadinya manajemen laba (Darmawati, 2003; dalam Guna dan Herawaty, 2010:2). *Corporate governance* berkembang dan berpegang pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak jarang pihak manajemen perusahaan mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Hal ini dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme *corporate governance*, yang mampu mensejajarkan

kepentingan pemegang saham (pemilik) dengan kepentingan manajer (Lastanti, 2004; dalam Purwaningtyas, 2011).

Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Lastanti, 2004; dalam Purwaningtyas, 2011). Mekanisme internal *corporate governance* meliputi kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit, dan komisaris independen dalam perusahaan. Sedangkan, mekanisme eksternal *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional. Peneliti dalam penelitian ini menguji mekanisme *corporate governance*, meliputi proporsi dewan komisaris independen yang berperan sebagai mekanisme internal dan kepemilikan institusional yang berperan sebagai mekanisme eksternal perusahaan.

Dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui peranannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan proporsi dewan komisaris independen, karena berdasarkan Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta (Kep-339/BEJ/07-2001; dalam Utami dan Rahmawati, 2008), bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan *corporate governance* yang baik. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

Pengawasan terhadap perusahaan yang dilakukan untuk meminimalisir konflik keagenan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak internal perusahaan saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan yaitu dengan mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional (Putri dan Nasir, 2006; dalam Kartikawati, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional sebagai mekanisme eksternal perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005; dalam Purwaningtyas, 2011). Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan (Murhadi, 2008; dalam Kartikawati, 2009). Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba (Darmawati, 2003; dalam Guna dan Herawaty, 2010). Perusahaan yang belum maksimal dalam menerapkan *corporate governance* dimungkinkan untuk memiliki permasalahan keagenan yang besar. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk membangun mekanisme *corporate governance*, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda (Dwitridinda, 2007; dalam Irawan dan Farahmita,

2012). Hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara juga faktor internal perusahaan dalam hal jenis usaha, jenis resiko usaha, struktur permodalan, manajemen serta sejarah perusahaan. Manajemen memegang peranan yang penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan terhadap struktur modalnya yaitu posisi perpajakan perusahaan (Andri, 2012). Salah satu strategi perusahaan dalam membayar pajak adalah melakukan perhitungan pajak dengan hati-hati atau dinamakan dengan *tax planning*, karena sistem pajak dapat mengurangi atau memperkuat masalah *corporate governance*. Selain itu, sifat lingkungan *corporate governance* perusahaan juga dapat mempengaruhi sifat dan konsekuensi dari sistem pajak (Desai dan Dharmapala, 2007). Kegiatan *tax planning* jika dilakukan dengan benar dalam hukum pajak, akan menguntungkan manajer dan pemegang saham, sebagai beban pajak yang ditanggung oleh kedua belah pihak dapat diminimalkan sebagai akibat dari strategi efisiensi pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk dapat menyeimbangkan interaksi antara penerapan mekanisme *corporate governance* dengan

tax planning yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat tercipta strategi perencanaan pajak yang efektif bagi perusahaan.

Terdapat pengaruh antara mekanisme *corporate governance* terhadap *tax planning*. Beberapa penelitian tersebut antara lain diteliti oleh Sabli dan Noor (2012) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, yaitu mekanisme internal dan eksternal perusahaan terhadap keterlibatan pajak dalam strategi *tax planning* yang lebih baik, sehingga mengakibatkan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) yang lebih rendah dibayarkan oleh perusahaan. Hasil empiris penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme internal dan eksternal perusahaan belum mempengaruhi *tax planning* perusahaan.

Irawan dan Farahmita (2012) meneliti bagaimana *corporate governance* mempengaruhi perilaku manajemen pajak dan memberikan kontribusi literatur tentang CG. Pertama, kompensasi direksi dan kepemilikan direksi sebagai proksi mekanisme CG dari suatu perusahaan, dalam mengelola pajak untuk meningkatkan kinerja. Kedua, kompensasi manajerial hubungannya terhadap manajemen pajak. Studi ini menemukan bahwa kepemilikan direksi menunjukkan hubungan signifikansi dalam mengurangi pajak dibayar tunai. Namun, kompensasi direksi tidak menghasilkan pajak yang lebih rendah dibayar dan tampaknya bukan merupakan mekanisme yang efektif dalam melakukan manajemen pajak.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012). Pada

penelitian ini, peneliti menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian sebelumnya, masih menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* baik internal maupun eksternal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax planning* suatu perusahaan. Pada penelitian Sabli dan Noor (2012), sampel yang digunakan yaitu perusahaan *Shariah Compliant* yang terdaftar di Bursa Malaysia. Proksi pengukuran *tax planning* yang digunakan adalah *corporate effective tax rate* (CETR). Variabel independen dan variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian Sabli dan Noor (2012), yaitu menggunakan variabel independen proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *return on asset* (ROA) dan intensitas modal. Peneliti menggunakan variabel kontrol tersebut, karena menurut Boediono (2005; dalam Haryadi, 2012) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara salah satunya dengan logaritma natural dari nilai buku dari total aset pada akhir tahun fiskal. Besar kecilnya perusahaan tersebut bisa saja memiliki kecenderungan terhadap proses manipulasi sehingga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Kemudian variabel kontrol *leverage*, digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari

tingkat hutang yang dilakukan dalam hal pengurangan pajak yang dibayar (Miller, 1997; dalam Andri, 2012). Jika perusahaan hanya didanai oleh ekuitas saham biasa, maka proksi pengukuran untuk tingkat pengembalian atas aktiva menggunakan ROA (*Return On Asset*). ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat laba yang diperoleh dalam hubungannya dengan investasi (Hutomo, 2012). Variabel kontrol terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah intensitas modal, yang berguna untuk mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Haryadi, 2012).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara mekanisme *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax planning*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan instusional terhadap *tax planning*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax planning*.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional terhadap *tax planning*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru dan mengolah pola pikir peneliti untuk dapat menganalisis permasalahan perusahaan serta dapat berguna ketika peneliti memasuki dunia kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang mekanisme *corporate governance* dan *tax planning*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap *tax planning*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir secara garis besar disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukurannya, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas simpulan secara keseluruhan dari pembahasan penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya.